

**PRAKTIK MUDHARABAH PADA TABUNGAN GIRO MENURUT
FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL (DSN)**
(Studi pada Bank Muamalat Pangeran Antasari Sukabumi Bandar Lampung)

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana S1 Dalam Sarjana Hukum (S.H)

Oleh :

DENNY FERIAN
NPM: 1621030317
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah



FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1442 H/2021M

**PRAKTIK MUDHARABAH PADA TABUNGAN GIRO MENURUT
FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL (DSN)**
(Studi pada Bank Muamalat Pangeran Antasari Sukabumi Bandar Lampung)

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana S1 Dalam Sarjana Hukum (S.H)

Oleh :

**DENNY FERIAN
NPM : 1621030317**

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah



**Pembimbing I : Drs. H. Chaidir Nasution, M.H.
Pembimbing II: Helma Maraliza, S.E.I, M.E.Sy.**

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1442 H / 2021 M**

ABSTRAK

Perbankan Syariah merupakan suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai organisasi antara masyarakat yang kelebihan dana dengan masyarakat yang kekurangan dana, dalam menjalankan aktivitasnya harus sesuai dengan prinsip prinsip Islam. Dalam dunia perbankan dikenal dengan yang dinamakan produk pembiayaan, akad mudharabah yang pada pelaksanaannya Bank memakai tabungan pemilik nasabah. Pengelolaan tabungan nasabah yang digunakan oleh pihak Bank akan membagikan keuntungan kepada pihak nasabah sesuai dengan perjanjian yang telah dilaksanakan antara kedua belah pihak, antara pihak Bank dan nasabah. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik mudharabah pada tabungan giro yang terjadi pada Bank Muamalat Pangeran Antasari Sukabumi Bandar Lampung?, dan apakah praktik mudharabah pada tabungan giro di Bank Muamalat Pangeran Antasari Sukabumi Bandar Lampung sesuai dengan fatwa DSN?. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktik akad mudharabah pada tabungan giro yang terjadi pada Bank Muamalat Pangeran Antasari Sukabumi Bandar Lampung, dan untuk mengetahui apakah praktik mudharabah pada tabungan giro di Bank Muamalat Pangeran Antasari Sukabumi Bandar Lampung sesuai dengan fatwa DSN. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan dilingkungan masyarakat tertentu, baik di lembaga organisasi-organisasi masyarakat (sosial), maupun lembaga pemerintah, penelitian ini bersifat *deskriptif analisis*, yaitu suatu penelitian yang setelah memamparkan dan melaporkan suatu keadaan, objek, gejala, kebiasaan, perilaku tertentu kemudian dianalisis secara lebih kritis. Adapun jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder, sedangkan dalam pengumpulan data digunakan metode wawancara dan dokumentasi. Pengolahan data melalui tahap editing dan sistematis data. Analisis data secara kualitatif dengan pendekatan berfikir menggunakan metode deduktif dan induktif. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa praktik akad mudharabah pada produk tabungan giro di Bank Muamalat Pangeran Antasari Sukabumi Bandar Lampung, Bank sebagai pengelola dana dari nasabah yang menabung dan mengelola dana tersebut untuk diberikan kepada nasabah yang kekurangan dana dalam bentuk pembiayaan dengan akad produk sesuai dengan masing-masing, tabungan dapat diambil sewaktu-waktu apabila nasabah membutuhkan, dengan perjanjian yang disepakati. Dengan menetapkan setoran pertama minimal sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) bagi perorangan. Untuk saldo minimum minimal sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan biaya penutupan sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu). Praktik Akad Mudharabah Pada Tabungan Giro Di Bank Muamalat Pangeran Antasari Sukabumi Bandar Lampung sudah sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan giro mudharabah dalam menjalankan operasionalnya.

SURAT PERNYATAAN

saya yang bertanda tangan di bawah :

Nama : DENNY FERIAN
NPM : 1621030317
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul **Praktik Mudharabah Pada Tabungan Giro Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) (Studi pada Bank Muamalat Pangeran Antasari Sukabumi Bandar Lampung)** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya yang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *Footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimalumi.

Bandar lampung 25/12/2020

Penulis



Denny Ferian
NPM. 1621030317



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PERSETUJUAN

Tim pembimbing, setelah mengoreksi dan memberikan masukan-masukan secukupnya, maka skripsi saudara :

Nama : **Denny Ferian**

Npm : **1621030317**

Fakultas : **Syariah**

Jurusan : **Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**

Judul : **PRAKTIK MUDHARABAH PADA TABUNGAN GIRO
MENURUT FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL
(DSN) (STUDI PADA BANK MUAMALAT PANGERAN
ANTASARI SUKABUMI BANDAR LAMPUNG)**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Drs. H. Chaidir Nasution, M.H.
NIP. 1958020111986031002

Pembimbing II

Helma Maraliza, S.E.I, M.E.Sv.
NIP.

Mengetahui
Ketua Jurusan Muamalah

Khoiruddin, M.S.I
NIP. 19780725200912100



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat: Jl.Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul PRAKTIK MUDHARABAH PADA TABUNGAN GIRO MENURUT FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL (DSN) (Studi Pada Bank Muamalat Pangeran Antasari Sukabumi, Bandar Lampung) disusun oleh, Denny Ferian, NPM: 1621030317, program studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah), telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syari'ah UIN RadenIntan Lampung pada Hari/Tanggal: Selasa, 23 februari 2021.

Tim Penguji

Ketua Sidang

: Khoiruddin, M.S.I.

Sekretaris

: Erik Rahman Gumiri, M.H.

Penguji Utama

: Dr. H. Khoirul Abror, M.H.

Penguji I

: Drs. H. Chaidir Nasution, M.H.

Penguji II

: Helma Maraliza, S.E.I, M.E.Sy.

Mengetahui

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Khoiruddin, M.H.
NIP. 197504282007101003

MOTTO

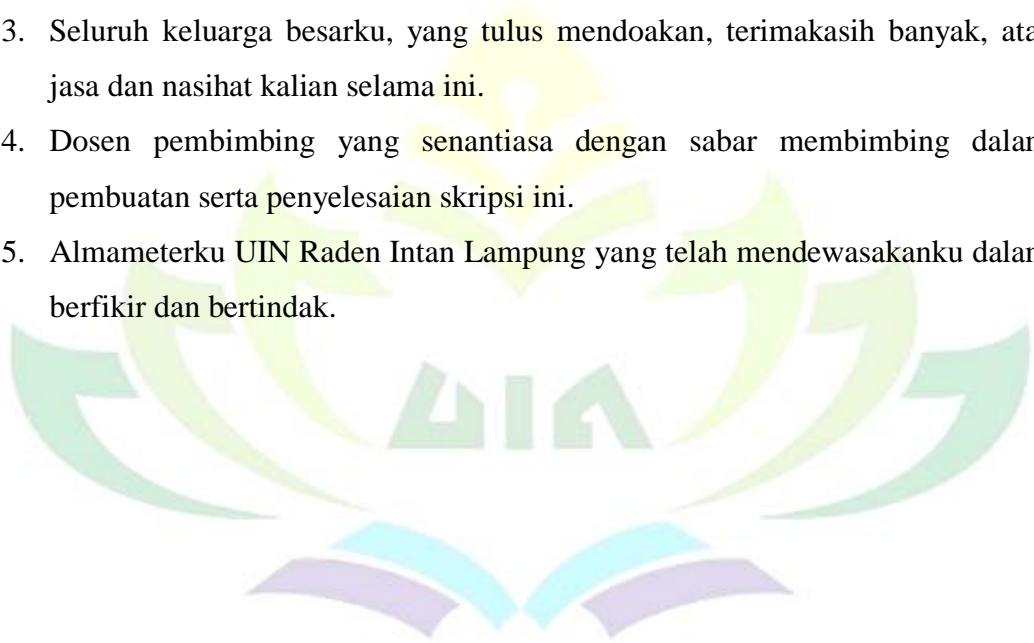
وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَهُ ۖ فَإِنْ أَثِمَ بَعْضُكُم بَعْضًا
فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ ۚ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۚ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا
فَإِنَّهُ إِثْمٌ قَلْبُهُ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Artinya: jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barang siapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS.Al-Baqarah (2) : 283)

PERSEMBAHAN

Sebagai ucapan terima kasih dan rasa hormat yang tulus skripsi ini dipersembahkan kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta, Ayahanda Eddy Budiarto dan Ibunda Mayurni yang telah membesarkanku, mendidikku, menuntun setiap langkahku, dan senantiasa untuk kesuksesanku.
2. Kakak dan Adikku Tika Andiana dan Devi Karmelita yang telah memberikan dukungan doa dan selalu memberikan semangat kepadaku untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Seluruh keluarga besarku, yang tulus mendoakan, terimakasih banyak, atas jasa dan nasihat kalian selama ini.
4. Dosen pembimbing yang senantiasa dengan sabar membimbing dalam pembuatan serta penyelesaian skripsi ini.
5. Almameterku UIN Raden Intan Lampung yang telah mendewasakanku dalam berfikir dan bertindak.

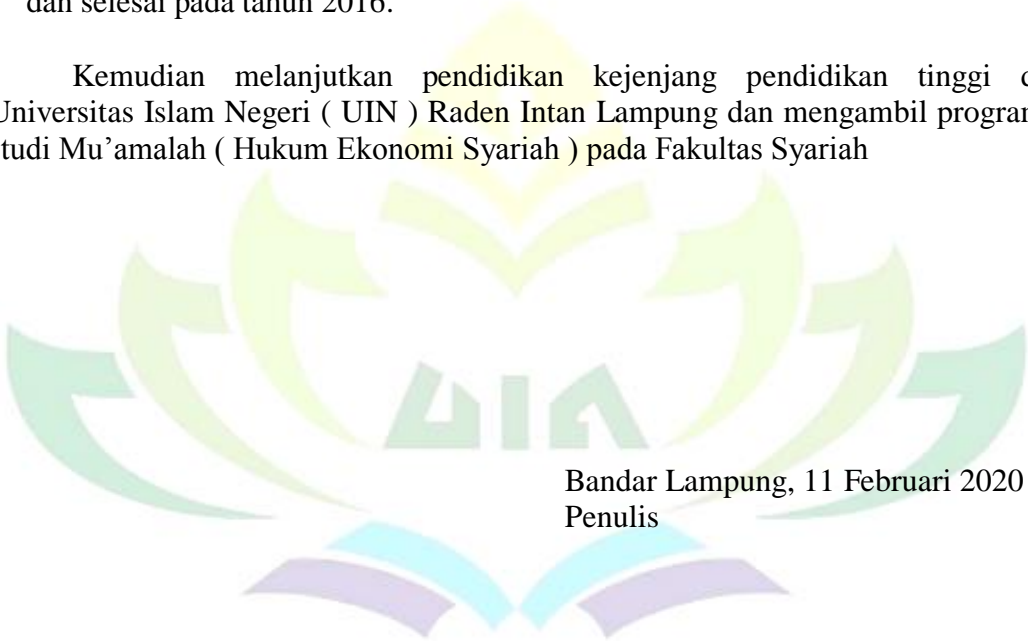


RIWAYAT HIDUP

Denny Ferian, dilahirkan pada tanggal 01 Juni 1998 di Bandar Lampung. Putra pertama dari 2 bersaudara pasangan dari Bapak Eddy Budiarto dan Ibu Mayurni. Jenjang pendidikan yang ditempuh yaitu :

1. Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 Sukarame Bandar Lampung pada tahun 2004 dan selesai pada tahun 2010.
2. Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 12 Bandar Lampung pada tahun 2010 dan selesai pada tahun 2013.
3. Sekolah Menengah Atas (SMA) Al-Azhar 3 Bandar Lampung pada tahun 2013 dan selesai pada tahun 2016.

Kemudian melanjutkan pendidikan kejenjang pendidikan tinggi di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung dan mengambil program studi Mu'amalah (Hukum Ekonomi Syariah) pada Fakultas Syariah



Bandar Lampung, 11 Februari 2020
Penulis

Denny Ferian

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT. Atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik, yang berjudul “ Hukum Islam Tentang Praktik *Mudharabah* Pada Tabungan Giro (Studi pada Bank Muamalat Pangeran Antasari Sukabumi, Bandar Lampung)”. Sholawat serta salam selalu tercurahkan, kepada teladan yang baik yaitu Nabi Muhammad Saw yang di nanti-nantikan syafa’atnya di *yaumul qiyamah*, beserta keluarga, para sahabat dan Insya Allah kita sebagai umatnya akan mendapatkan syafaatnya dihari akhir kelak. Penulisan skripsi ini dilaksanakan dalam rangka melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat akademik untuk menyelesaikan studi di Muamalah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, serta guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH). Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tiada batas kepada :

1. Dr. H. Khairuddin Tahmid, M.H selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung
2. Khoiruddin, M.S.I selaku ketua Jurusan Muamalah. Serta Ibu Juhrotul Khulwah, M.S.I selaku Sekretaris Jurusan Muamalah UIN Raden Intan Lampung
3. Drs. H. Chaidir Nasution, M.H. selaku pembimbing I dan Helma Maraliza, S.E.I, M.E.Sy. selaku dosen pembimbing II yang dengan penuh kesabaran telah membimbing, mengarahkan, mendukung serta memberikan petunjuk dalam penulisan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis dan juga seluruh Staf Kasubbag yang telah membantu untuk menyelesaikan skripsi ini

5. Tim Penguji Skripsi: Bapak Khoiruddin, M.S.I. selaku ketua sidang, Bapak Erick Rahman Gumiri, M.H. selaku sekretaris sidang, Bapak Dr.H.Koirul Abror, M.H. selaku penguji satu. atas arahan dan masukannya dalam sidang.
6. Para pegawai perpustakaan baik perpustakaan pusat UIN Raden Intan maupun perpustakaan fakultas syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kemudahan dalam menyediakan referensi yang dibutuhkan
7. Seluruh Karyawan Bank Muamalat Pangeran Antasari Sukabumi Bandar Lampung yang telah mengizinkan dan meluangkan waktunya untuk melengkapi data yang dibutuhkan pada skripsi ini
8. Keluarga tercinta yang tidak henti-hentinya mendoakan dan memberi dukungan.
9. Teruntuk Abang- abang ku di kampus Heri Firmando, Mufti Syafiq dan Nurhamad Sofyan atas semua bantuannya dan sebagai motivasi, semangat dalam menyelesaikan penulisan ini.
10. Seluruh teman-teman warung Uni atas doa dan motivasinya.
11. Teman-teman KKN kelompok 89 desa Tanjung Harapan, Margatiga, Lampung Timur. terimakasih atas doa, motivasi dan kebersamaan selama 40 hari yang sangat berkesan.
12. Teman-teman seperjuangan, Jurusan MU angkatan 2016 Khususnya Muamalah E yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, persahabatan dan kebersamaan berjuang dalam menempuh perjalanan ini, terus bersemangat dan berkarya.
13. Almameterku UIN Raden Intan Lampung yang telah mendewasakanku dalam berfikir dan bertindak.

Semoga bantuan yang ikhlas dan amal baik dari semua pihak mendapat pahala dan balasan yang melimpah dari Allah Swt. Akhir kata, saya memohon taufik dan hidayah-Nya kepada Allah Swt. Dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi diri sendiri khususnya dan bagi kita semua pada umumnya.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

COVER DALAM	i
ABSTRAK	ii
PERSETUJUAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi

BAB I: PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	2
C. Latar Belakang Masalah.....	3
D. Fokus Penelitian	5
E. Rumusan Masalah	6
F. Tujuan Penelitian.....	6
G. Signifikasi Penelitian.....	6
H. Metode Penelitian.....	7

BAB II: KAJIAN TEORI

A. Mudharabah	
1. Pengertian dan Dasar Hukum	11
2. Prinsip, Rukun Dan Syarat.....	22
3. Macam – Macam dan Karakteristik Mudharabah.....	35
4. Hal-hal yang membatalkan Mudharabah	44
5. Ketentuan - Ketentuan Mudharabah dalam Fatwa DSN	45
6. Manfaat dan resiko Mudharabah	47
7. Tabungan Giro	48
B. Tinjauan Pustaka.....	53

BAB III: DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

- A. Gambaran Umum Bank Muamalat Pangeran Antasari Sukabumi Bandar Lampung.
1. Sejarah Berdirinya Bank Muamalat..... 56
 2. Letak Geografis 58
 3. Makna Logo Bank Muamalat 59
 4. Visi dan Misi..... 60
 5. Struktur Kepengurusan Bank Muamalat..... 61
- B. Produk-Produk Bank Muamalat 68
- C. Pelaksanaan Praktik Mudharabah Tabungan Giro pada Bank Muamalat Pangeran Antasari Sukabumi Bandar Lampung..... 73

BAB IV: ANALISIS DATA

- A. Praktik Mudharabah Tabungan Giro pada Bank Muamalat Pangeran Antasari Sukabumi Bandar Lampung..... 82
- B. Praktik Akad Mudharabah Pada Tabungan Giro di Bank Muamalat Pangeran Antasari Sukabumi Bandar Lampung Sesuai Tidak dengan Fatwa DSN 87

BAB V : PENUTUP

- A. Kesimpulan 90
- B. Rekomendasi..... 91

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Keterangan Izin Research
- Lampiran 2 Blanko Konsultasi Skripsi
- Lampiran 3 Pedoman Wawancara
- Lampiran 4 Dokumen-dokumen Pendukung
- Lampiran 5 Surat Keterangan Lulus Plagiat

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum mengadakan pembahasan lebih lanjut tentang skripsi ini, terlebih dahulu saya akan menjelaskan pengertian judul. Judul merupakan kerangka dalam bertindak apa lagi dalam suatu penelitian ilmiah. Hal ini untuk menghindari salah penafsiran di kalangan pembaca. Maka perlu adanya suatu penjelasan dengan memberikan arti beberapa istilah di dalam skripsi ini. Skripsi ini berjudul **Praktik Mudharabah Pada Tabungan Giro Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) (Studi di Bank Muamalat Pangeran Antasari Sukabumi Bandar Lampung)**. Untuk itu diuraikan pengertian dari istilah-istilah judul tersebut sebagai berikut.

1. Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) ialah fatwa yang dibentuk oleh MUI sebagai lembaga tertinggi perbankan syariah di Indonesia memiliki tanggung jawab dengan membuat fatwa-fatwa terkait dengan hukum perbankan yang dibutuhkan masyarakat muslim secara umum. Dan menjadi sebagai landasan hukum pelaksanaan perogram perbankan dilapangan. Fatwa MUI dijadikan sebagai rujukan lembaga perbankan dalam menjalankan program-program agar tidak bertentangan dengan syariah itu sendiri.
2. Mudharabah adalah Praktik pelaksanaan secara nyata, untuk melakukan kerja sama antara dua pihak untuk menjalankan suatu usaha atau bisnis tertentu, dimana pihak satu sebagai pemilik modal. Kemudian pihak yang

lainnya sebagai pelaksana usaha.¹ Berdasarkan pengertian di atas akad mudharabah adalah penanaman dana dari pemilik dana/bank Syariah(*shohibul maal*) kepada pengelola dana/nasabah (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usah tertentu, dengan pembagian menggunakan metode bagi untung dan rugi (*Profit and loss sharing*) atau metode bagi pendapatan (*revenue sharing*) antara kedua belah pihak berdasarkan *nisbah* yang telah disepakati sebelumnya.

3. Tabungan Giro adalah simpanan pada Bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan mempergunakan cek, bilyet giro dan surat perintah pembayaran lainnya.²

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka yang dimaksud dengan judul skripsi ini adalah yaitu Praktik Mudharabah Pada Tabungan Giro Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) (Studi di Bank Muamalat Pangeran Antasari Sukabumi Bandar Lampung). Maksud dari judul ini adalah bagaimana ketentuan-ketentuan mudharabah dalam praktik pada tabungan giro Bank Muamalat Pangeran Antasari Sukabumi Bandar Lampung ditinjau dari Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN).

B. Alasan Memilih Judul

Adapun alasan-alasan penulis tertarik dalam memilih menentukan judul tersebut adalah.

¹Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Jakarta: RajaGrafindo Persada,2016), h.157.

²<https://id.scribd.com/doc/112156532/Makalah-Tentang-Giro> di akses pada tanggal 29 november 2019.

1. Alasan Objektif

praktik mudharabah dalam tabungan giro Secara objektif, untuk menganalisa pembiayaan mudharabah yang terjadi pada nasabah Bank Muamalat Pangeran Antasari Sukabumi Bandar Lampung. Sesuai tidak dengan fatwa DSN MUI.

2. Alasan Subjektif

- a. Permasalahan penelitian merupakan permasalahan yang berkaitan dengan jurusan yang peneliti tekuni di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- b. Bagi penulis pentingnya meneliti masalah yang akan diteliti terkait dengan judul proposal, hal ini dikarenakan peneliti ingin mengimplementasikan tentang praktik mudharabah pada tabungan giro yang terjadi pada Bank Muamalat

C. Latar Belakang Masalah

Bank Muamalat Indonesia, adalah bank umum pertama di Indonesia yang menerapkan prinsip Syariah Islam dalam menjalankan operasionalnya. Didirikan pada tahun 1991, yang diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Perbankan Syariah merupakan suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai organisasi antara masyarakat yang kelebihan dana dengan masyarakat yang kekurangan dana yang dalam menjalankan aktivitasnya harus sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Bank Syariah juga berfungsi sebagai perantara yakni menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam

bentuk fasilitas pembiayaan dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.³

Dalam dunia perbankan dikenal dengan yang dinamakan produk pembiayaan, Pada dasarnya sepintas dari segi tujuan produk pembiayaan yang dilakukan pihak perbankan konvensional dan perbankan Syariah memiliki persamaan yaitu melakukan pembiayaan atas barang atau jasa yang dikehendaki oleh nasabah dengan tujuan memperoleh keuntungan yang hanya dikehendaki pihak perbankan. Namun pada prinsipnya produk pembiayaan perbankan Syariah lebih mengarah pada akhlak yaitu mengedepankan pemberian bantuan pembiayaan untuk mensejahterahkan masyarakat dengan produk pembiayaan perbankan Syariah itu sendiri.

Dalam rangka melayani masyarakat, terutama masyarakat Muslim, Bank syariah menyediakan berbagai macam produk perbankan.⁴ Setiap produk syariah dapat dimanfaatkan baik untuk penggalangan dana maupun penyaluran dana. Namun, tidak semua produk tersebut berfungsi dari dua hal tersebut, ada akad atau produk yang hanya difungsikan dalam pembiayaan. Dalam akad *mudharabah* dapat dipakai dalam pengumpulan dana (*funding*) maupun dalam penyaluran dana (*financing*). Dalam segi *funding*, akad *mudharabah* ini dapat berbentuk giro, tabungan, dan atau deposito (1,3,6 atau 12 bulan).⁵

³Muhammad, *Model-model Akad Pembiayaan di Bank Syariah* (Yogyakarta: UII Press,2009), h.4.

⁴Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2012), h.246.

⁵Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2006), h.311.

Akad yang terjadi pada Bank Muammalat merupakan akad mudharabah yang pada pelaksanaanya Bank memakai tabungan pemilik nasabah. Pengelolaan tabungan nasabah yang digunakan oleh pihak Bank akan membagikan keuntungan kepada pihak nasabah sesuai dengan perjanjian yang telah dilaksanakan antara kedua belah pihak antara pihak Bank dan nasabah. Dalam praktik peminjaman Tabungan Giro oleh pihak Bank nasabah ingin mengambil keseluruhan tabungan yang dimiliki oleh nasabah ketika dana yang dipinjam masih dikelola oleh pihak Bank.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh apakah praktik Akad mudharabah pada tabungan giro Bank Muammalat sesuai dengan teori mudharabah dalam fatwa DSN, sehingga penulis mengangkat judul penelitian tentang Praktik Mudharabah Pada Tabungan Giro Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional.

D. Fokus Penelitian

Fokus penelitian memberikan batasan dalam studi dari pengumpulan data sehingga peneliti ini fokus dalam memahami masalah-masalah yang menjadi tujuan penelitian. Melalui fokus penelitian ini suatu informasi di lapangan dapat dipilih-pilih sesuai dengan konteks permasalahannya, sehingga rumusan masalah ini saling berkaitan. Fokus penelitian pada skripsi ini adalah tentang Praktik Mudharabah Pada Tabungan Giro Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional.

E. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Praktik Akad Mudharabah Pada Tabungan Giro yang terjadi pada Bank Muamalat Pangeran Antasari Sukabumi Bandar Lampung.
2. Apakah Praktik Akad Mudharabah Pada Tabungan Giro di Bank Muamalat Pangeran Antasari Sukabumi Bandar Lampung Sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN).

F. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana Praktik Akad Mudharabah Pada Tabungan Giro yang terjadi pada Bank Muamalat Pangeran Antasari Sukabumi Bandar Lampung.
2. Untuk mengetahui tentang Praktik Akad Mudharabah Pada Tabungan Giro di Bank Muamalat Pangeran Antasari Sukabumi Bandar Lampung sesuai tidak dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN).

G. Signifikansi Penelitian

Kegunaan penelitian ini diharapkan akan berguna diantara lain:

1. Ditinjau dari pengembangan keilmuan, hasil penelitian ini diharapkan sangat bermanfaat bagi seluruh masyarakat dapat menambah pengetahuan mengenai pengaruh bagi hasil tabungan giro pada bank syariah.
2. Penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan informasi dan pemahaman yang lebih mendalam kepada masyarakat dalam melakukan berbagai macam kegiatan ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai *syrari'at* Islam.

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan dilingkungan masyarakat tertentu, baik di lembaga organisasi-organisasi masyarakat (sosial), maupun lembaga pemerintah.⁶ Penelitian ini pada hakekatnya merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realis tentang apa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Dalam hal ini peneliti dilaksanakan dengan cara terjun langsung ke lokasi penelitian di Bank Muamalat Pangeran Antasari Sukabumi Bandar Lampung.

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini bersifat *deskriptif analisis*. Yaitu suatu penelitian yang setelah memamparkan dan melaporkan suatu keadaan, objek, gejala, kebiasaan, perilaku tertentu kemudian di analisis secara lebih kritis. Dalam penelitian ini akan dideskripsikan tentang bagaimana akad mudharabah pada tabungan giro pada Bank Muamalat Pangeran Antasari Sukabumi Bandar Lampung.

2. Data dan sumber data

Fokus penelitian ini lebih mengarah pada persoalan penentuan hukum yang terkait pada akad mudharabah pada tabungan giro.

⁶ Lexy J. Moleong, *Metode penelitian Kualitatif* (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2011), h.81.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama. Atau objek yang diteliti.⁷ Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah data yang didapat dari tempat yang menjadi objek penelitian yaitu wawancara kepada pihak Bank Muamalat Pangeran Antasari Sukabumi Bandar Lampung.

b. Data sekunder

Data adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpulan data, misalnya: lewat orang lain, atau lewat dokumen. Data sekunder diperoleh peneliti dari buku-buku yang membicarakan topik yang berhubungan langsung dengan judul dan pokok bahasan kajian ini akan tetapi mempunyai relevansi dengan permasalahan yang dikaji.⁸

3. Populasi

Populasi adalah totalitas dari semua objek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas, dan lengkap, objek atau nilai yang akan diteliti dalam populasi dapat berupa orang, perusahaan, lembaga, media dan sebagainya. Berdasarkan teori Suharsimi arikunto apabila Populasi kurang dari seratus lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian Populasi, tetapi jika jumlah Populasi besar, dapat diambil antara 10-15% atau 15-20% atau lebih. Berdasarkan dari teori ini maka jumlah

⁷Kholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Akasara, 2007), h.70.

⁸*Ibid*, h.69.

populasi kurang dari 100 maka diambil keseluruhan, sehingga penelitian ini adalah penelitian populasi. Jumlah populasi keseluruhan dalam penelitian ini berjumlah 5 orang, yaitu:

- a. *Sub Branch Manager* Bank Muamalat berjumlah 1 orang
- b. Nasabah Mudharabah Bank Muamalat berjumlah 4 orang

4. Pengumpulan Data

Dalam usaha menghimpun data untuk penelitian ini, digunakan beberapa metode, yaitu:

a. Wawancara (Interview)

Wawancara adalah Proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan. Wawancara dilakukan penulis dengan cara melakukan tanya jawab dengan *Manager* Bank Muamalat Pangeran Antasari Sukabumi Bandar Lampung penulis menyiapkan daftar pertanyaan untuk diajukan secara langsung kepada pihak Bank Muamalat Pangeran Antasari Sukabumi Bandar Lampung.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda dan

sebagainya.⁹ Dokumentasi yang dilakukan untuk mencari data-data di tempat penelitian.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan cara untuk menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber. Analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif yaitu menganalisa data yang diperoleh dengan mengomentari menggunakan teori yang dipakai deduktif yaitu analisa yang berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum mendapatkan kesimpulan khusus. Sedangkan pendekatan induktif menekankan pada pengamatan dahulu, lalu menarik kesimpulan berdasarkan pengamatan tersebut. Metode ini sering disebut sebagai sebuah pendekatan pengambilan kesimpulan dari khusus menjadi umum.

⁹ Lexy J. Moleong, *Metode penelitian Kualitatif*,....., h.156-166.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Mudharabah

1. Pengertian dan Dasar Hukum

a. Pengertian

Mudharabah berasal dari kata *ضرن* mengikuti wazan *مفاعلة* yang menandakan pekerjaan yang dilakukan oleh dua belah pihak atau lebih. Mudharabah adalah suatu produk financial syariah yang berbasis kemitraan (*partnership*). Dari definisi tersebut telah diketahui bahwa dalam mudharabah terdapat dua pihak yang berjanji melakukan kerjasama dalam suatu ikatan kemitraan. Pihak yang satu merupakan pihak yang menyediakan dana untuk diinvestasikan ke dalam kerjasama kemitraan tersebut, yang disebut *shahib al-mal* atau *rabbul-maal*, sedangkan pihak yang lain menyediakan pikiran, tenaga dan waktu untuk mengelola usaha kerja sama tersebut yang disebut *mudharib*. Mereka bersepakat untuk membagi hasil usaha yang berupa keuntungan saja berdasarkan pembagian yang porsi pembagian keuntungan tersebut telah disepakati di awal perjanjian, sedangkan dalam hal terjadi kerugian dipikul seluruhnya oleh *shahib al-mal* dan *mudharib* menanggung kehilangan pikiran, tenaga dan waktunya yang telah dicurahkan untuk mengelola usaha tersebut.

Mudharabah berasal dari kata *dhorb*, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses

seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usahanya. mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola¹

Menurut istilah, mudharabah dikemukakan oleh para ulama sebagai berikut :

- 1) Menurut para fuqaha, mudharabah adalah akad antara dua belah pihak (orang) saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan.
- 2) Menurut ulama Hanafiyah, mudharabah adalah memandang tujuan dua pihak yang berakad yang berserikat dalam keuntungan atau laba karena diserahkan kepada yang lain dan yang lain punya jasa untuk mengelola harta itu.
- 3) Menurut ulama Malikiyyah, mudharabah adalah akad perwakilan, dimana pemilik harta mengeluarkan hartanya kepada yang lain untuk diperdagangkan dengan pembayaran yang ditentukan (emas atau perak).
- 4) Menurut Imam Hanabillah berpendapat bahwa mudharabah ialah ibarat pemilik harta menyerahkan hartanya dengan ukuran tertentu kepada orang yang berdagang dengan bagian dari keuntungan yang diketahui.

¹Muhammad Safii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), h. 95.

- 5) Ulama Syafiiyah berpendapat bahwa mudharabah ialah akad yang menentukan seseorang menyerahkan hartanya kepada yang lain.²
- 6) Sayyid Sabiq berpendapat bahwa mudharabah ialah akad antara dua pihak dimana salah satu pihak mengeluarkan sejumlah uang (sebagai modal) kepada pihak untuk diperdagangkan. Laba dibagi dua sesuai dengan kesepakatan.³

Secara umum mudharabah dibagi menjadi dua yaitu mudharabah *muthalaq'ah* dan mudharabah *muqayyad'ah*, yang dimaksud dengan mudharabah *muthalaqah* merupakan kerjasama pemilik modal dengan pengelola modal yang memiliki cakupan bidang kerja yang sangat luas tanpa ada pembatasan. Artinya pengelola modal memiliki kebebasan untuk pengusaha modal tersebut kedalam sektor usaha apapun yang penting halal dan menguntungkan. Pemilik dana tidak membatasi bidang usaha tertentu. Sedangkan mudharabah *muqayyad'ah* adalah akad yang dilakukan antara pemilik modal (*shohibul maal*) dengan pengelola (*mudharib*), dimana nisbah bagi hasil disepakati di awal untuk dibagi bersama, sedangkan kerugian (*rugi*) ditanggung pemilik modal.⁴ Menurut Abdur Rahman L.Do, mudharabah dalam terminologi hukum adalah suatu kontrak dimana suatu kekayaan (*property*) atau persediaan (*stock*) tertentu (*ras al-mal*) ditawarkan oleh pemiliknya atau pengurusnya (*rab al-mal*)

²Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, Cet Ke-7, 2011), h.136-137

³Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 4 (Jakarta: Pundi Aksara, 2006), h.217.

⁴Makhalul ilmu, *Teori dan Praktek mikro Keuangan Syariah* (Yogyakarta: UII, 2002), h. 33.

kepada pihak lain untuk membentuk suatu kemitraan (*joint partnership*) yang di antara kedua pihak dalam kemitraan itu akan berbagi keuntungan. Pihak yang lain berhak untuk memperoleh keuntungan karena kejayaan mengelola kekayaan itu. Orang ini disebut *mudharib*. Perjanjian ini adalah suatu *contract of co-partnership* (Doi).⁵

Dr.Sutan Remi Sjahdeini, menjelaskan bahwa Mudharabah adalah transaksi pembiayaan berdasarkan syari'ah. Kepercayaan merupakan unsur terpenting dalam hal ini kepercayaan dari pemilik modal (investor) terhadap pelaksana usaha, Apabila usaha tersebut mengalami kegagalan, sehingga terjadi kerugian, yang sampai mengakibatkan sebagian atau seluruh modal yang ditanamkan oleh pemilik modal habis, maka yang menanggung kerugian keuangan hanya pemilik modal sendiri, sedangkan pelaksana usaha sama sekali tidak menanggung atau tidak mengganti kerugian atas modal yang hilang, kecuali apabila kerugian tersebut terjadi sebagai akibat kecurangan yang dilakukan oleh pelaksana usaha. Pelaksana usaha hanya menanggung kehilangan atau resiko berupa waktu, pikiran, dan jerih payah yang telah dicurahkan selama mengelola usaha, serta kehilangan kesempatan untuk memperoleh sebagian dari pembagian keuntungan yang berdasarkan perjanjian mudharabah itu diperjanjikan. Dalam transaksi mudharabah resiko *financial*

⁵Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2014), h.292.

se penuhnya dipikul oleh pemilik modal sedangkan pelaksana usaha sama sekali tidak memikul resiko *financial*, yang dipikulnya hanyalah resiko nonfinancial.⁶

Fatwa Dewan Syariah Nasional mendefinisikan mudharabah sebagai berikut, mudharabah adalah akad kerja sama dalam suatu usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*malik, Shahib al-mal, lks*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak kedua (*amil, mudharib, nasabah*) berlaku selaku pengelola dan keuntungan usaha di bagi antara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.⁷

Salah satunya yaitu kepercayaan merupakan landasan mudharabah, mudharabah adalah suatu transaksi pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, yang juga digunakan sebagai transaksi pembiayaan perbankan syariah, yang dilakukan oleh para pihak berdasarkan kepercayaan menurut Kazarian. Kepercayaan atau *trusti* merupakan unsur yang terpenting dalam transaksi pembiayaan mudharabah yaitu kepercayaan dari *Shahib al-mal* kepada *mudharib*. Kepercayaan merupakan unsur terpenting karena dalam transaksi mudharabah, *Shahib al-mal* tidak boleh meminta jaminan atau agunan dari *mudharib* dan tidak boleh ikut campur didalam pengelolaan proyek atau usaha yang *notabene* dibiayai dengan dana *Shahib al-mal* tersebut.

⁶Firdaweri, “Perikatan Syariah Berbasis Mudharabah (Teori dan Peraktik)” Jurnal Asas, Vol.6, No .2,(Juli 2014), h.59

⁷*Ibid*,..., h.294.

Apabila salah satu usaha mengalami kegagalan, sehingga karena itu terjadi kerugian sampai mengakibatkan sebagian atau bahkan seluruh modal yang ditanamkan oleh *Shahib al-mal* habis, maka yang menanggung kerugian keuangan hanya *Shahib al-mal* sendiri, sedangkan *mudharib* sama sekali tidak menanggung atau tidak harus mengganti kerugian atas modal yang hilang, kecuali apabila kerugian tersebut terjadi sebagai akibat kecurangan yang dilakukan oleh *mudharib*. Apabila *mudharib* melakukan kecurangan, maka kerugian yang timbul ditanggung oleh *mudharib*. Namun jika kerugian tersebut murni karena resiko usaha (*business risk*), maka *mudharib* hanya menanggung kehilangan atau resiko berupa waktu, fikiran dan jerih payah yang telah dicurahkan selama mengelola proyek atau usaha tersebut, serta kehilangan kesempatan untuk memperoleh sebagian dari pembagian keuntungan yang berdasar perjanjian mudharabah itu diperjanjikan bahwa antara *Shahib al-mal* dan *mudharib* akan dibagi keuntungan (apabila usaha bersama mereka itu memperoleh keuntungan) berdasar prinsip bagi hasil atau *profit and loss sharing principle* (PLS) di antara mereka. Dengan kata lain, sekalipun sesuai dengan prinsip yang harus diterapkan dalam transaksi-transaksi berdasarkan prinsip syariah, yaitu bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam suatu transaksi harus bersama-sama menanggung resiko, namun dalam hal transaksi mudharabah resiko finansial sepenuhnya dipukul oleh *Shahib al-mal*, sedangkan

mudharib sama sekali tidak memikul resiko finansial, yang dipikul hanyalah resiko nonfinansial (Chapra). Itulah sebabnya mengapa mudharabah terkadang disebut pula sebagai “*partnership in profit*” (Chapra).

Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang telah dituangkan dalam kontrak, apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu di akibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola. Maka si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Dapat disimpulkan mudharabah adalah penyerahan harta dari pemilik modal/harta kepada pihak pengelola dan keuntungan dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati, sedangkan kerugian hanya ditanggung oleh pemilik modal. Pengelola tidak menanggung kerugian material kerana ia telah menanggung kerugian lain berupa waktu dan tenaga.⁸

b. Dasar Hukum

Dasar hukum mudharabah: akad seperti ini dibolehkan dalam Islam, karena bertujuan untuk saling membantu antara pemilik modal dan seorang ahli dalam memutar uang.⁹ Secara umum landasan dasar

⁸Neneng Nurhasanah, *Mudharabah Dalam Teori Dan Praktik* (Bandung : Refika Aditama, 2015), h. 67

⁹Dahlan Abdul Aziz, *et.al.*, *Ensiklopedia Hukum islam*, jilid 4 (Jakarta: Ichtiar Baru Van Houve, 1996), h.1196.

Syariah mudharabah lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini tampak dari ayat-ayat dan hadis berikut:

1) Al-Quran

a) Firman Allah QS. Al-Jumuah (62):10 :

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ
وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Artinya: apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.

b) Firman Allah QS. Al-Baqarah (2):198 :

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ﴿١٩٨﴾

Artinya: Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu.

c) Firman Allah QS. An-Nissa (4):29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا
أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu.

d) Firman Allah QS. Al-Baqarah (2): 283

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَهُ ۖ فَإِنْ أَثِمَ
بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ ۚ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۚ وَلَا
تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فإِنَّهٗ ءَاثِمٌ قَلْبُهُ ۚ وَاللَّهُ بِمَا
تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Artinya: Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; Dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

2) Al-Hadis

a) Hadis Nabi riwayat Imam At-Tirmidzi

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ
أَحَلَ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَىٰ شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ
حَلَالًا أَوْ أَحَلَ حَرَامًا. (رواه الترمذي)¹⁰

Artinya: Shulh (penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk mufakat) boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali shulh yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang

¹⁰Hadist riwayat Imam Tirmidzi, *Sunan Tirmidzi*, Kitab Ahkam, bab: “ma dzukira ‘an Rasulillah”, No: 1272.

mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.(HR.At-Tirmidzi)

b) Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ :
الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ ، وَالْمُقَارَضَةُ ، وَجَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا
لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)¹¹

Artinya: Dari Shahih bin Suhaib r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradha (mudharabah), dan mencampur gandum halus dengan gandum kasar (jerawat) untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk di jual”. (HR. Ibnu Majah no 2280, kitab At-Tijarah).

3) Ijma

Diriwayatkan, sejumlah sahabat menyerahkan (kepada orang, *mudharib*) harta anak yatim sebagai mudharabah dan tak ada seorang pun mengingkari mereka, karenanya hal itu dipandang sebagai ijma.¹²

Imam Zailani dalam kitabnya *Nasbu Ar-rayah* (4/13) telah menyatakan bahwa para sahabat telah berkonsensus kan legitimasi pengelolaan harta anak yatim secara mudharabah. Kesepakatan para sahabat ini sejalan dengan spirit hadist yang dikutip Abu Ubaid dalam kitab *al-amwal* (454).¹³ “Rasulullah SAW telah berkhutbah didepan kaumnya seraya berkata wahai para wali yatim, bergegaslah

¹¹Jalaluddin Al-Suyuthi, *Al-Jami' Al-Shaghir min Ahadist Al-Basyir Al-Nadzir*, (Oman: Dar Al-hadits,2016), h. 241.

¹²Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh).

¹³Jeni Susyanti, *Operasional Keuangan Syariah*, (Malang: BPFE UNISMA, 2016) , h.17

untuk menginvestasikan harta amanah yang ada ditanganmu, janganlah didiamkan sehingga termakan oleh zakat”.

Indikasi dari hadis ini adalah apabila menginvestasikan harta anak yatim secara mudharabah sudah dianjurkan, apabila mudharabah dalam harta sendiri, Adapun pengertian zakat disini adalah seandainya harta tersebut diinvestasikan, maka zakatnya akan diambil dari *Return on investment* (keuntungan) bukan dari modal. Dengan demikian harta amanah tersebut akan senantiasa berkembang, bukan berkurang.

4) Qiyas

Mudharabah diqiyaskan kepada *al-musaqah* (menyuruh seseorang untuk mengelola kebun). Selain diantara manusia, ada yang miskin dan adapula yang kaya. Disatu sisi, banyak orang kaya yang tidak dapat mengusahakan hartanya. Disisi lain, tidak sedikit orang miskin yang mau berkerja, tetapi tidak memiliki modal. Dengan demikian, adanya mudharabah ditunjukan antara lain untuk memenuhi kebutuhan kedua golongan di atas, yakni untuk kemaslahatan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka.¹⁴

5) Kaidah *Fiqh*

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

¹⁴Rachmat syafei, *Fiqh Muamalah untuk IAIN, STAIN, PTAIS, dan Umum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h.226.

Artinya: Pada dasarnya segala bentuk muamalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya¹⁵.

2. Prinsip, Rukun dan Syarat

a. Prinsip

Prinsip berbagi keuntungan diantara pihak-pihak yang melakukan akad mudharabah. Dalam akad mudharabah, laba harus bersih harus dibagi antara *shahibul maal* dan *madhrib* berdasarkan suatu proporsi yang adil sebagaimana telah disepakati sebelumnya dan secara eksplisit telah disebutkan akad perjanjian mudharabah. Pembagian laba tidak boleh dilakukan sebelum kerugian yang ada ditutupi dan ekuitas *shahibul maal* sepenuhnya dikembalikan.

Menurut Umer Chapra, prinsip umum disini adalah bahwa *shahibul maal* hanya menanggung resiko modal (risiko finansial), sedangkan *mudharib* hanya menanggung resiko waktu dan usahanya (resiko nonfinansial).

1) Prinsip berbagi kerugian diantara pihak-pihak yang berakad.

Disamping bagi hasil, dalam mudharabah dikenal yang adanya bagi rugi karena mudharabah bersifat *lost and profit sharing*. Dengan asas keseimbangan dan keadilan, kerugian finansial seluruhnya dibebankan kepada *shohibul maal*, kecuali ada bukti yang menguatkan bahwa kerugian tersebut berasal dari kelalaian, kesalahan, dan kecurangan *mudhorib*. Sementara itu *mudhorib*

¹⁵Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2006),h. 128.

menanggung kerugian nonfinansial berupa waktu, tenaga, dan jerih payah yang dilakukannya. dalam artian *mudharib* tidak memperoleh apapun dari kerja kerasnya.

2) Prinsip kejelasan.

Dalam mudharabah, masalah jumlah modal yang akan diberikan *shahibul maal*, presentase keuntungan yang akan dibagikan, syarat-syarat yang dikehendaki masing-masing pihak, dan jangka waktu perjanjiannya harus disebutkan dengan tegas dan jelas. Kejelasan merupakan prinsip yang harus ada dalam akad ini, untuk itu bentuk perjanjian tertulis harus dilaksanakan dalam akad mudharabah.

3) Prinsip kepercayaan dan amanah.

Masalah kepercayaan terutama dari pihak pemilik modal merupakan unsur penentu terjadinya akad mudharabah. Jika tidak ada kepercayaan dari *shahibul maal* maka transaksi mudharabah tidak akan terjadi. untuk itu, *shahibul maal* dapat mengakhiri perjanjian mudharabah secara sepihak apabila tidak memiliki kepercayaan lagi kepada *mudharib*. Kepercayaan ini harus diimbangi dengan sikap amanah dari pihak pengelola.

4) Prinsip kehati-hatian.

Sikap hati-hati merupakan prinsip yang penting dan mendasar dalam akad mudharabah. jika sikap hati-hati tidak dilakukan oleh pemilik modal, maka dia bisa tertipu dan mengalami kerugian

finansial. Jika sikap hati-hati tidak dimiliki pengelola, maka usahanya akan mengalami kerugian, disamping akan hilangnya kerugian finansial, kerugian waktu, tenaga, dan jerih payah yang telah didedikasikannya, dia juga akan kehilangan kepercayaan.¹⁶

b. Rukun dan Syarat

Sebagaimana akad lain dalam syariat islam, agar mudharabah atau *qirad* sah, maka harus memenuhi rukun dan syarat mudharabah, menurut mazhab Hanafi, Sedangkan rukun dalam mudharabah berdasarkan *jumhur* Ulama ada 3, yaitu; dua orang yang melakukan akad (*al-aqidani*), modal (*maqud alaih*) dan *shighat* (ijab dan qabul), Ulama Syafiiyah lebih merinci lagi menjadi enam rukun :¹⁷

- 1) *Al-aqidayn* (dua orang yang melakukan perjanjian)
- 2) *Maal* (saham atau modal)
- 3) *Amal* (usaha yang dikelola)
- 4) *Al-ribhu* (laba atau keuntungan)
- 5) *Sighat* (pernyataan ijab dan qabul dari kedua belah pihak)

Menurut *jumhur* Ulama, rukun mudharabah ada tiga, yaitu;

- 1) *Aqid*, yaitu pemilik modal (*Shohibul mal*) dan pengelola (*amil / mudharib*)
- 2) *Maqud alaih*, yaitu modal, tenaga (pekerjaan) dan keuntungan.
- 3) *Shighat*, yaitu *ijab* dan *qabul*.¹⁸

¹⁶Neneng Nurhasanah, *Mudharabah Dalam Teori Dan Praktik*,.....,h79-83

¹⁷Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*,....,h.136.

¹⁸Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 371.

Sedangkan menurut Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa yang menjadi rukun akad mudharabah adalah *ijab* dan *qabul* saja, sedangkan sisa rukun-rukun yang disebutkan *jumhur* Ulama itu, sebagai syarat akad mudharabah.¹⁹

Faktor-faktor yang harus ada (rukun) dalam akad mudharabah adalah;

- 1) Pelaku (pemilik modal ataupun pengelola usaha)
- 2) Objek mudharabah (modal dan kerja)
- 3) Persetujuan kedua belah pihak (*ijab* dan *qabul*)
- 4) Nisbah bagi hasil.

Pelaku, jelaslah bahwa rukun dalam akad mudharabah sama dengan rukun akad jual beli ditambah satu faktor tambahan, yakni nisbah keuntungan. Faktor pertama (pelaku) kiranya sudah cukup jelas. Dalam akad mudharabah, harus ada minimal dua pelaku, pihak pertama bertindak sebagai pemberi dana (*Shahibul mal*) pihak kedua bertindak sebagai pelaksana usaha (*mudharib*). Tanpa dua pelaku ini akad mudharabah tidak ada.

Objek, faktor kedua objek mudharabah merupakan konsekuensi logis dan tindakan yang dilakukan oleh parapelaku. Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek mudharabah, sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjanya sebagai objek mudharabah. Modal yang diserahkan bisa berbentuk uang atau barang yang dirinci berapa nilai uangnya, sedangkan kerja yang diserahkan bisa berbentuk

¹⁹ Abu Azam Al-Hadi, *Fiqh Muamalah Kontemporer*..., h.4

keahlian, keterampilan, skill dan lain-lain. Tanpa dua objek ini mudharabah pun tidak akan ada.

Persetujuan, faktor ketiga yakni persetujuan kedua belah pihak, merupakan konsekuensi dari prinsip *an-taradiin minkum* (sama-sama rela). Disini kedua belah pihak harus secara rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad mudharabah. Si pemilik dana setuju dengan perannya untuk berkontribusi dana, sementara si pelaksana usaha pun setuju dengan perannya untuk berkontribusi kerja.

Nisbah bagi hasil, faktor yang keempat (yakni nisbah) adalah rukun yang khas dalam akad mudharabah, yang tidak ada dalam akad jual beli. Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang ber mudharabah. *Mudharib* mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan *shohibul mal* mendapatkan modal atas penyertaan modalnya. Nisbah keuntungan inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan.²⁰

Syarat-syarat yang harus dipenuhi terkait dengan rukun diatas adalah sebagai berikut :

- 1) *Al-aqidayn* (dua orang yang melakukan perjanjian), haruslah orang yang cakap bertindak hukum dan cakap diangkat sebagai wakil,

²⁰Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h.205-206

karena satu posisi orang yang akan mengelola modal adalah wakil dari pemilik modal,

- 2) *Maal* (saham atau modal), harus diketahui dengan jelas agar dapat dibedakan antara saham yang diperdagangkan dengan keuntungan dari perdagangan yang akan dibagikan kepada kedua belah pihak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
- 3) *Amal* (usaha yang dikelola), usaha yang dikelola tidak bertentangan dengan hukum islam. Misalnya usaha tempat judi, minuman yang memabukkan, narkoba dan obat-obat terlarang, dan usaha lainya yang merugikan orang lain.
- 4) *Al-ribhu* (laba dan keuntungan), keuntungan akan menjadi milik bersama dan dibagi sesuai dengan kesepakatan diawal perjanjian. Pembagian keuntungan tidak jelas, menurut ulama hanafiyah perjanjian tersebut rusak(batal).
- 5) *Sighat* (pernyataan ijab qabul dari kedua belah pihak) untuk melaksanakan usahanya.²¹

Adapun syarat-syarat mudharabah berhubungan dengan pelaku mudharabah (*al-aqidain*), modal dan akad, bagi pemilik modal dan pengusaha harus cakap bertindak hukum dan cakap menjadi wakil.

Syarat dalam hal modal adalah harus berbentuk uang, dan jelas jumlahnya. Juga diisyaratkan harus ada, tunai dan bukan dalam bentuk hutang. Dan harus diberikan kepada *mudharib*. Oleh karena itu jika

²¹Abu Azam Al-Hadi, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Cet 1- (Surabaya: UIN SA Press, 2014), h. 5

modal itu berbentuk barang, menurut ulama *fiqh* tidak dibolehkan, karena sulit untuk menentukan keuntungannya.²²

Adapun syarat-syarat *mudharabah*, sesuai dengan rukun yang telah dikemukakan jumhur ulama adalah :

- 1) Syarat pelaku akad
 - a) Keharusan memenuhi kecakapan untuk melakukan wakalah.²³
 - b) Harus cakap bertindak atau cakap hukum.
 - c) Berakal dan baligh.²⁴
- 2) Syarat *ijab* dan *qabul* harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan beberapa hal berikut:
 - a) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
 - b) Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
 - c) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.²⁵
- 3) Syarat modal
 - a) Modal harus berupa uang yang masih berlaku.
 - b) Besarnya modal harus diketahui.
 - c) Modal harus barang tertentu dan ada, bukan utang.
 - d) Modal harus diserahkan kepada *amil (mudharib)*.²⁶

²²Nafan, *pembiayaan musyarakah dan mudharabah* (Yogyakarta: graha ilmu, 2014), h.118

²³*Ibid*,..., h. 482

²⁴Imam Mostofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Raja Grafindo, 2008), h. 155

²⁵Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000
Tentang Pembiayaan Mudharabah

4) Syarat pekerjaan (kegiatan usaha)

- a) Kegiatan usaha adalah hak eksklusif *mudharib*, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.
- b) Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya hubungan *mudharabah*, yaitu keuntungan.
- c) Pengelola tidak boleh menyalahi hukum Syariah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan *mudharabah*, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu.²⁷

5) Syarat keuntungan

- a) Besarnya keuntungan harus diketahui.
- b) Keuntungan merupakan bagian dari milik bersama (*musyaa*).²⁸
- c) Proporsi atau persentase pembagian hasil dihitung dari keuntungan, tidak termasuk modal.
- d) Keuntungan tidak boleh dihitung dari persentase dari jumlah modal yang di berikan *shohibul maal*. Perhitungan keuntungan bagi hasil harus berdasarkan keuntungan yang didapat.
- e) Tidak boleh menentukan jumlah tertentu untuk pembagian hasil.²⁹

²⁶Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wadillatuhu*, Jilid 5 (Jakarta:Gema Insani, 2011), h.482-485.

²⁷Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 *Tentang Pembiayaan Mudharabah*

²⁸Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wadillatuhu*,..., h. 486-488

²⁹Imam Mostofa, *Fiqh Muamalah Kontenporer*,..., h. 156-157

Adapun syarat-syarat mudharabah berhubungan dengan pelaku mudharabah (*al-aqidani*), modal dan akad. Bagi pemilik modal dan pengusaha harus cakap bertindak hukum dan cakap untuk menjadi wakil.

Syarat dalam hal modal adalah harus berbentuk uang, dan jelas jumlahnya. Juga disyaratkan harus ada, tunai, bukan dalam bentuk utang, dan baru diberikan kepada *mudharib*. Oleh karenanya jika modal itu berbentuk barang, menurut Ulama Fiqh itu tidak dibolehkan, karena sulit untuk menentukan keuntungannya. Yang berhubungan dengan laba keuntungan disyaratkan bahwa pembagian laba harus memiliki ukuran yang jelas dan laba harus berupa bagian yang umum (*masyhur*),³⁰

Untuk masing-masing rukun tersebut di atas terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi:

- 1) Kedua pihak yang mengadakan persetujuan.
- 2) Yang terkait dengan orang yang melakukan transaksi haruslah orang yang cakap bertindak hukum dan cakap diangkat sebagai wali.
- 3) Ucapan pernyataan Ucapan (*sighat*) yaitu penawaran dan penerimaan (*ijab* dan *qabul*) harus diucapkan oleh kedua belah pihak guna menunjukkan kemauan mereka untuk

³⁰Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h.228.

menyempurnakan kontrak. *Sighat* tersebut harus sesuai dengan hal-hal berikut:

- a) Secara eksplisit dan implisit menunjukan tujuan kontrak.
 - b) *Sighat* dianggap tidak sah jika salah satu pihak menolak syarat-syarat yang diajukan dalam penawaran. Atau, salah satu pihak meninggalkan tempat berlangsungnya negosiasi kontrak tersebut, sebelum kesepakatan disempurnakan.
 - c) Kontrak boleh dilakukan secara lisan atau verbal, bisa juga tertulis dan ditandatangani. Akademi Fiqih Islam dari Organisasi Konferensi Islam (OKI) membolehkan pula pelaksanaan kontrak melalui korespondensi, atau menggunakan cara-cara komunikasi modern seperti faksimili atau komputer.³¹
- 6) Harta sebagai modal

Yang terkait dengan modal, disyaratkan:

- a) Berbentuk uang.
- b) Jelas jumlahnya.
- c) Tunai Diserahkan sepenuhnya kepada *mudharib*. Karena pada haikaknya, bila modal tidak diserahkan oleh *shohibul maal*, maka perjanjian *mudharabah* tidak sah.³²

³¹Antonio Muhammad Syafii, *Bank Syariah; Wawancara Ulama dan Cendikiawan* (Jakarta: Tazkia Intitute, 1999), h. 174

³²Sjahdeini Sutan Remi, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia* (Jakarta: PT. Temprint, 1999), h. 32

Jika modal itu berbentuk barang, menurut ulama tidak diperbolehkan, karena sulit untuk menentukan keuntungannya. Demikian juga halnya dengan utang. Utang tidak dapat dijadikan modal mudharabah. Tetapi, jika modal tersebut berupa *al-wadiah*, yaitu titipan pemilik modal kepada pedagang, maka *wadiah* itu boleh dijadikan modal mudharabah. Apabila sebagian modal itu tetap dipegang oleh pemilik modal, dalam arti tidak diserahkan seluruhnya, menurut Ulama Mazhab Hanafi, Maliki, dan Syafii hal itu tidak diperbolehkan. Namun, Ulama Mazhab Hambali menyatakan bahwa sebagian modal tersebut boleh berada ditangan pemilik modal, asalkan tidak mengganggu kelancaran usaha tersebut.³³

7) Kerja

Mengenai kerja atau jenis usaha pengelolaan ini sebagian Ulama, khususnya Syafii dan Maliki, mensyaratkan bahwa usaha itu hanya berupa usaha dagang (*commercial*). Tetapi Abu Hanifah membolehkan usaha apa saja selain berdagang, termasuk kegiatan kerajinan atau industri.³⁴ Kegiatan usaha oleh pengelola (*mudharib*), sebagai perimbangan (*muqabil*) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut:

³³ Abdul Aziz Dahlan, et.al., *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jilid 4 (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), h.1197

³⁴ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), h. 104

- a) Kegiatan usaha adalah hak eksklusif *mudharib*, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan. Namun Mazhab Hambali mengizinkan partisipasi penyedia dana dalam pekerjaan itu.
- b) Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya hubungan mudharabah, yaitu keuntungan.
- c) Pengelola tidak boleh menyalahi hukum Syariah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu.
- d) Pengelola harus mematuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh penyedia dana jika syarat-syarat itu tidak bertolak belakang dengan isi kontrak mudharabah.

8) Keuntungan

Keuntungan adalah jumlah yang dapat didapatkan sebagai kelebihan dari modal. Keuntungan adalah tujuan akhir mudharabah. Keuntungan terikat oleh syarat-syarat berikut:

- a) Keuntungan harus dibagi untuk kedua pihak, salah satu tidak diperkenankan mengambil seluruh keuntungan tanpa membagi kepada pihak lain.
- b) Proporsi keuntungan masing-masing pihak harus diketahui pada waktu berkontrak dan proposi tersebut harus dari keuntungan. Yang dinyatakan dengan presentase nisbah. Misalnya 60% dari

keuntungan untuk pemodal dan 40% keuntungan untuk pengelola. Karena itu *mudharabah* menjadi tidak sah jika keuntungannya dibagi dengan, menentukan jumlah tertentu dari keuntungan seperti Rp 100.000,00 atau Rp. 150.000,00 atau menentukan salah satu pihak mendapat jumlah yang tidak jelas dari keuntungan.

- c) Kalau jangka waktu akad mudharabah relatif lama, tiga tahun keatas maka, nisbah keuntungan dapat disepakati untuk ditinjau dari waktu ke waktu.
- d) Kedua belah pihak juga harus menyepakati biaya-biaya apa saja yang ditanggung pengelola. Kesepakatan ini penting karena biaya akan mempengaruhi nilai keuntungan.

Terkait dengan hukum yang menyangkut keuntungan, ada tiga hal yang menjadi pembahasan yaitu:

1. Pengakuan keuntungan

Harus ditentukan suatu waktu untuk menilai keuntungan yang dicapai dalam suatu mudharabah. Menurut Akademi Fiqh Islam (OKI), "keuntungan dibayarkan (*due*) ketika diakui, dan dimiliki dengan pernyataan atau revaluasi, dan hanya bisa dibayarkan pada waktu dibagikan."³⁵

2. Hak terhadap keuntungan

³⁵Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah; Wawancara Ulama dan Cendikiawan* (Jakarta: Tazkia Intitute, 1999), h. 178

Mazhab Hanafi dan sebagian Mazhab Syafii mengatakan bahwa keuntungan harus diakui seandainya keuntungan usaha sudah diperoleh (walaupun belum dibagikan). Sedangkan Mazhab Maliki sebagian Mazhab Hambali menyebutkan bahwa keuntungan hanya dapat diakui hanya ketika dibagikan secara tunai kepada kedua pihak.

3. Distribusi keuntungan

Distribusi atau pembagian keuntungan umumnya dilakukan dengan mengembalikan lebih dahulu modal yang ditanamkan oleh *shohibul maal*. Meskipun demikian kebanyakan ulama menyetujui bila kedua pihak sepakat membagi keuntungan tanpa mengembalikan modal. Tentu saja hal tersebut berlaku sepanjang kerja sama mudharabah masih berlangsung.

Para ulama berbeda pendapat tentang keabsahan menahan untung. Bila keuntungan telah dibagikan, setelah itu mengalami kerugian, sebagian ulama berpendapat bahwa pengelola diminta untuk menutupi kerugian tersebut dari keuntungan yang telah dibagikan kepadanya.³⁶

3. Macam-macam dan Karakteristik Mudharabah

a. Macam-Macam

Pada prinsipnya, mudharabah sifatnya mutlak dimana *shohibul maal* tidak menetapkan restriksi atau syarat-syarat tertentu kepada si

³⁶Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah; Wawancara Ulama dan Cendekiawan*,..., h. 178

mudharib. Bentuk mudharabah ini disebut mudharabah *mutlaqah*, atau dalam bahasa Inggrisnya dikenal sebagai *Unrestricted Investment Account* (URIA). Namun demikian, apabila dipandang perlu, *Shohibul maal* boleh menetapkan batasan-batasan atau syarat-syarat tertentu guna menyelamatkan modalnya dari resiko kerugian, syarat-syarat atau batasan ini harus dipenuhi oleh si *mudharib*, apabila *mudharib* melanggar batasan-batasan ini, ia harus bertanggung jawab atas kerugian yang timbul, jenis mudharabah seperti ini disebut mudharabah *muqayyadah*.³⁷

Secara umum mudharabah dibagi kedalam dua jenis, yaitu: mudharabah *muthlaqah* dan mudharabah *muqayyadah*.

1) *Mudharabah Muathlaqah*

Transaksi yang dimaksud dengan mudharabah *muthlaqah* adalah bentuk kerjasama antara *shohibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis. Dalam pembahasan *fiqh* ulama *Salaf ash Shalih* sering kali dicontohkan dengan ungkapan *ifal ma syita* (lakukan sesukamu) dari *Shohibul maal* ke *mudharib* yang memberi kekuasaan sangat besar untuk menjalankan aktifitas usahanya, asalkan sesuai dengan prinsip Syariah Islam. Mudharabah *Muathlaqah* adalah akad mudharabah dimana *shahibul maal*

³⁷Adiwarma A.Karim, *Bank Islam "Analisis Fiqh dan Keuangan"* (Cet 10; Jakarta : Rajawali Pers, 2014), h. 212.

memberikan kebebasan kepada pengelola dana (*mudharib*) dalam pengelolaan investasinya.

Mudharabah *muathalaqah* dapat disebut juga dengan investasi dari pemilik dana kepada bank syariah, dan bukan merupakan kewajiban atau ekuitas bank syariah. Bank syariah tidak mempunyai kewajiban untuk mengembalikannya apabila terjadi kerugian atas pengelolaan dana yang bukan disebabkan kelalaian atau kesalahan bank sebagai *mudharib*. Namun sebaliknya, dalam hal bank syariah (*mudharib*) melakukan kesalahan atau kelalaian dalam pengelolaan dana investor (*shahibul maal*), maka bank syariah wajib mengganti semua dan investasi mudharabah *muthalaqah* dalam aplikasi perbankan syariah.

2) Mudharabah *Muqayyadah*

Mudharabah *muqayyadah* atau disebut juga dengan istilah *restricted* mudharabah / *specified* mudharabah adalah kebalikan mudharabah *muthlaqah*. Si *mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum si *shohibul maal* memasuki dunia usaha.

Mudharabah *Muqayyadah* merupakan akad kerjasama usaha antara dua belah pihak yang mana pihak pertama *shahibul maal* dan pihak kedua sebagai pengelola dana (*mudharib*). *Shahibul maal* menginvestasikan dananya kepada *mudharib*, dan memberikan batasan

atas penggunaan dana yang diinvestasikannya.³⁸ Batasan antara lain tentang :

- a) Tempat dan cara berinvestasi
- b) Jenis investasi
- c) Objek investasi
- d) Jangka waktu

Mudharabah *Muqayyadah* terbagi menjadi dua yaitu :

1) Mudharabah *muqayyadah on balance sheet*

Mudharabah *muqayyadah on balance sheet* merupakan akad mudharabah *muqayyadah* yang mana *mudharib* ikut menanggung risiko atas kerugian dana yang diinvestasikan oleh *shahibul maal* memberikan batasan secara umum. Misalnya, batasan tentang jenis usaha, jangka waktu pembiayaanya, dan sector usahanya.

2) Mudharabah *Muqayyadah Off Balance Sheet*

Mudharabah *Muqayyadah Off Balance Sheet* merupakan akad mudharabah *muqayyadah* yang mana pihak *shahibul maal* memberikan batasan yang jelas, baik batasan tentang proyek yang diperbolehkan, jangka waktu serta pihak pelaksanaan pekerjaan. *Mudharib* nya telah ditetapkan oleh *shahibul maal*.

3) Mudharabah *Musytarakah*

Mudharabah *musytarakah* adalah mudharabah yang pengelola dananya turut menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama

³⁸Gita Danuprata, *Buku Ajar Manajemen Perbankan Syariah* (Jakarta: Salemba Empat, 2013), h.90

investasi. Di awal kerjasama, akad yang disepakati adalah akad mudharabah dengan modal 100% dari pemilik dana, setelah berjalannya operasi usaha dengan pertimbangan tertentu dengan kesepakatan dengan pemilik dana. Pengelola dana ikut menanamkan modalnya dalam usaha tersebut dan akadnya disebut dengan mudharabah (merupakan perpaduan antara akad mudharabah dan *musyarakah*).³⁹

Pada prinsipnya, mudharabah sifatnya mutlak dimana *shohibul maal* tidak menetapkan retribusi atau syarat-syarat tertentu kepada *mudharib*. Bentuk mudharabah ini disebut mudharabah *mutlaqah*, atau dalam bahasa inggrisnya dikenal sebagai *Unsertricted Investment Account* (URIA). Namun demikian, apabila dipandang perlu *shohibul maal* boleh menetapkan batasan-batasan atau syarat-syarat tertentu untuk menyelamatkan modalnya dari resiko keuangan. Syarat-syarat atau batasan ini harus dipenuhi oleh si *mudharib*. Apabila *mudharib* melanggar batasan-batasan ini, ia harus bertanggung jawab atas kerugian yang timbul. Jenis mudharabah seperti ini disebut mudharabah *muqayyadah* (mudharabah terbatas) atau dalam bahasa inggrisnya disebut *Restricted Investment Account* (RIA). Jadi, pada dasarnya terdapat dua bentuk mudharabah, yaitu mudharabah *mutlaqah* dan mudharabah *muqayyadah*.⁴⁰

³⁹Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah; Wacana Ulama dan Cendikiawan*,..., h. 151

⁴⁰Muhammad Yazid, *Hukum Ekonomi Islam (Fiqh Muamalah)*, Cet 1-(Surabaya: UIN SA Press, 2014). h.158

Namun demikian, dalam praktik lembaga keuangan syariah modern, kini dikenal dua bentuk mudharabah *muqayyadah*, yaitu *on balance sheet* dan *off balance sheet*. Dalam mudharabah *muqayyadah on balance sheet*, aliran dana terjadi dari suatu anggota investor ke sekelompok pelaksana usaha dalam beberapa sektor terbatas, misalnya pertanian, manufaktur, dan jasa. Anggota investor lainnya mungkin mensyaratkan dana hanya boleh dipakai untuk pembiayaan di sektor pertambangan, properti, dan pertanian. Selain berdasarkan sektor, anggota investor bisa saja mensyaratkan berdasarkan jenis akad yang digunakan, misalnya hanya boleh digunakan berdasarkan akad cicilan saja, atau penyewaan cicilan saja, atau kerja sama usaha saja. Skema seperti ini disebut dengan *on balance sheet*, karena dicatat dalam neraca LKS.⁴¹

b. Karakteristik Mudharabah

- 1) Kedua belah pihak yang mengadakan kontrak antara pemilik dana dan *mudharib* akan menentukan kapasitas baik sebagai nasabah ataupun pemilik. Di dalam akad tercantum pernyataan yang harus dilakukan kedua belah pihak yang mengadakan kontrak dengan ketentuan sebagai berikut⁴²:

- a) Di dalam perjanjian tersebut harus dinyatakan secara tersurat maupun tersirat tentang tujuan kontrak

⁴¹*Ibid*,..., h.159

⁴²Wiroso, *Penghimpunan Dana Dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah* (Jakarta: PT Grasino, 2005), h.38

- b) Penawaran dan penerimaan kontrak harus disepakati kedua belah pihak di dalam kontrak tersebut.
 - c) Maksud penawaran dan penerimaan merupakan suatu kesatuan informasi yang sama penjelasannya. Perjanjian bisa saja berlangsung melalui proposal tertulis maupun langsung ditandatangani, melainkan bisa juga dilakukan melalui surat menyurat/koremden dengan *fax* atau computer yang telah disahkan oleh Cendiklan Fiqih Islam dan Organisasi Konferensi Islam.
- 2) Modal adalah uang sejumlah uang pemilik dana diberikan kepada *mudharib* untuk diinvestasikan (dikelola) dalam kegiatan usaha mudharabah. Adapun syarat-syarat yang tercakup dalam modal antara lain:
- a) Jumlah modal harus diketahui secara pasti termasuk jenis mata uangnya
 - b) Modal harus dalam bentuk tunai, seandainya berbentuk aset menurut Jumhur Ulama Fiqih diperbolehkan asalkan berbentuk barang niaga dan mempunyai nilai atau historisnya pada saat mengadakan kontrak.
 - c) Modal harus tersedia dalam bentuk tunai dan tidak boleh dalam bentuk piutang.
 - d) Modal mudharabah langsung dibayar kepada beberapa mudharabah. Beberapa Fuqaha berbeda pendapat mengenai cara

realisasi pencarian dana yaitu dibayar langsung dengan cara lain dilaksanakan dengan memungkinkan *mudharib* untuk memperoleh manfaat dari modal tersebut bagaimanapun cara akuisisinya. Sesuai dengan pendapat kedua, pengadaan kontrak dapat dilaksanakan untuk keseluruhan modal dan pembayarannya kepada *mudharib* dapat dibuat dalam beberapa angsuran.

3) Keuntungan adalah jumlah yang melebihi jumlah modal dan merupakan tujuan *mudharabah* dengan syarat-syarat sebagai berikut:

a) Keuntungan ini haruslah berlaku bagi kedua belah pihak dan tidak ada satu pihak pun yang memilikinya.

b) Haruslah menjadi perhatian dari kedua belah pihak dan tidak terdapat pihak ketiga yang akan turut memperoleh bagi hasil darinya. Porsi bagi hasil keuntungan untuk masing-masing pihak harus disepakati bersama pada saat perjanjian ditandatangani. Bagi hasil *mudharib* harus secara jelas dinyatakan pada saat pengadaan kontrak dilakukan.

c) Pemilik dana menanggung semua kerugian sebaliknya *mudharib* tidak menanggung semua kerugian sedikitpun. Akan tetapi, *mudharib* harus menanggung kerugian bila kerugian itu timbul dari pelanggaran perjanjian atau penghilangan dana tersebut.

4) Jenis usaha/ pekerjaan diharapkan mewakili/menggambarkan adanya kontribusi *mudharib* dalam usahanya untuk mengembalikan/ membayar modal kepada penyedia dana. Jenis pekerjaan dalam hal

ini berhubungan dengan masalah manajemen dari pembiayaan mudharabah itu sendiri. di bawah ini merupakan syarat-syarat yang harus diterapkan dalam usaha/perkerjaan mudharabah adalah sebagai berikut:

- a) Bentuk pekerjaan dan usaha merupakan hak khusus *mudharib* tidak ada intervensi manajemen dari pemilik dana.
 - b) Penyedia dana tidak harus boleh membatasi kegiatan *mudharib* seperti melarang *mudharib* agar tidak sukses dalam pencarian laba/keuntungan.
 - c) *Mudharib* tidak boleh melanggar hukum Syariah Islam dalam usahanya dan harus mematuhi praktik-praktik usaha yang berlaku.
 - d) *Mudharib* harus memenuhi syarat-syarat yang diajukan pemilik dana asalkan syarat-syarat tersebut tidak bertentangan dengan kontrak mudharabah tersebut.
- 5) Modal mudharabah tidak boleh dalam penguasaan pemilik dana, sehingga tidak dapat ditarik sewaktu-waktu. Penarikan dana mudharabah hanya dapat dilakukan sesuai dengan waktu yang disepakati (periode yang ditentukan). Penarikan dana yang dilakukan setiap saat akan membawa dampak berkurangnya pembagian hasil usaha oleh nasabah yang menginvestasikan dananya.

Garansi dalam mudharabah untuk menunjukkan adanya tanggung jawab *mudharib* dalam mengembalikan modal kepada pemilik dana dalam semua pekerjaannya. Hal ini berarti bahwa *mudharib* akan

bertanggung jawab untuk mengembalikan modal kepada pemilik dana dalam hal apapun, dan tidak diperbolehkan pada waktu jatuh tempo, kenyataan bahwa kepemilikan *mudharib* akan dana tersebut dibuat sebagai salah satu *trust* dan dengan demikian tidak menjamin dana tersebut terkecuali dalam hal *omisi* atau pelanggaran.⁴³

4. Hal-hal yang membatalkan Mudharabah

Mudharabah berakhir ketika ada hal-hal sebagai berikut :

- a. Salah satu syarat sahnya mudharabah tidak lagi terpenuhi. Apabila salah satu dari syarat-syarat sahnya mudharabah tidak terpenuhi lagi, sedangkan *mudharib* telah menerima harta dan memperdagangkannya, maka dia hanya berhak memperoleh upah yang wajar karena dia telah mengadakan transaksi dengan seizin pemilik modal dan melakukan pekerjaan yang pantas dia dapatkan upahnya. Keuntungan yang ada adalah milik pemilik modal karena dalam kondisi ini *mudharib* hanyalah seorang pekerja yang tidak bertanggung jawab kecuali apabila bertindak lalai.
- b. *Mudharib* bertindak lalim, lalai dalam memelihara harta, atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan tujuan akad. Dalam kondisi ini mudharabah batal dan *mudharib* bertanggung jawab apabila harta musnah karena dialah penyebab kemusnahannya.
- c. *Mudharib* atau pemilik harta meninggal dunia apabila salah satunya atau keduanya meninggal dunia maka mudharabah berakhir.

⁴³Wiroso, *Penghimpunan Dana Dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, ..., h.38-40

- d. Salah satu pelaku menjadi gila apabila salah satu menjadi gila maka akad mudharabah tersebut berakhir.

Murtadnya pemilik modal rusaknya modal mudharabah ditangan *mudharib*.⁴⁴

5. Ketentuan — ketentuan Mudharabah dalam Fatwa DSN

Adapun ketentuan mengenai pembiayaan Mudharabah sudah diatur dan ditetapkan oleh DSN-MUI Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah, menentukan dan menetapkan Ketentuan pembiayaan:

- a. Pembiayaan Mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh Perbankan Syariah kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.
- b. Dalam pembiayaan ini perbankan sebagai *shahibul maal* (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai *Mudharib* (pengelola usaha)
- c. Jangka waktu usaha, tata cara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (perbankan dengan pengusaha)
- d. *Mudharib* boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syariah; dan LKS tidak ikut serta dalam *management* perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
- e. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan hutang piutang.
- f. LKS sebagai penyedia dana penanggung semua kerugian akibat dari mudharabah kecuali jika *mudharib* (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, menyelahi perjanjian.
- g. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun agar *mudharib* tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari *mudharib* atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila *mudharib* terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati saat akad.
- h. Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN.⁴⁵

⁴⁴Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wadillatuhu*,..., h.511-512

⁴⁵Ahmad Ilham Solihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), h.172-173

- i. Biaya operasional dibebankan kepada *mudharib*.
- j. Dalam hal penyanggah dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, *mudharib* berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.

Rukun dan syarat pembiayaan

1. Penyedia dana (*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*) harus cakap hukum
2. Pernyataan *ijab* dan *qabul* harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad) dengan memperhatikan hal-hal berikut :
 - a. Penawaran dan permintaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad)
 - b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak
 - c. Akad dituangkan secara tertulis melalui korespondensi atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern
3. Modal ialah sejumlah uang atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada *mudharib* untuk tujuan usaha dengan syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya
 - b. Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad
 - c. Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada *mudharib*, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan akad⁴⁶
4. Keuntungan *mudharabah* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut harus dipenuhi :
 - a. Harus diperuntukkan untuk kedua belah pihak dan tidak boleh diisyaratkan untuk satu pihak
 - b. Bagian keuntungan proposional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk presentase (*nisbah*) dari keuntungan sesuai dengan kesepakatan
 - c. Penyedia dana menanggung kerugian akibat dari *mudharabah*, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan bila terjadi kerugian.

⁴⁶Zainudin Ali, *Hukum Perbankan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h.251-252

5. Kegiatan usaha oleh pengelola (*mudharib*) sebagai perimbangan modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut :
 - a. Kegiatan usaha adalah hal eksklusif *mudharib* tanpa campur tangan penyedia dana tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.
 - b. Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan *mudharabah* yaitu keuntungan.
 - c. Pengelola tidak boleh menyalahi hukum Syariah Islam dalam tindakanya yang berhubungan dengan *mudharabah*, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu.⁴⁷
6. Ketentuan dan syarat pembiayaan
 - a. *Mudharabah* boleh dibatasi pada periode tertentu
 - b. Kontr tidak boleh dikaitkan (*mualaq*) dengan sebuah kejadian di masa depan yang belum tentu terjadi
 - c. Pada dasarnya, dalam *mudharabah* tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah (*yad al-amanah*), kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian atau pelanggaran kesepakatan
 - d. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan Arbitase Syariah setelah tidak tercapai
 - e. kesepakatan melalui musyawarah.

6. Manfaat dan resiko Mudharabah

- a. Manfaat *mudharabah* Bank menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat
- b. Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan atau hasil usaha bank sehingga bank tidak akan pernah mengalami *negative spread*.
- c. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow* atau arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah.

⁴⁷Zainudin Ali, *Hukum Perbankan*, ...h.252

- d. Bank akan lebih selektif dan hati-hati mencari usaha yang benar-benar halal, aman dan menguntungkan karena keuntungan yang konkret dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.
- e. Prinsip bagi hasil dalam *al-mudharabah* / *al-musyarakah* ini berbeda dengan prinsip bunga tetapi dimana bank akan menagih penerimaan pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga atau tetap berapa pun keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.

Sedangkan Risiko yang terdapat dalam *al-mudharabah*, terutama pada penerapannya dalam pembiayaan, relative tinggi diantaranya :

- 1) *Side streaming*, nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak
- 2) Lalai dan kesalahan yang disengaja
- 3) Penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabahnya tidak jujur.⁴⁸

7. Tabungan Giro

Giro adalah simpanan pihak ketiga pada bank yang dapat digunakan oleh pemiliknya sebagai alat pembayaran, dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, surat perintah pembayaran lainnya (SPPL) atau dengan cara pemindah bukuan.

Rekening giro sering disebut juga dengan rekening koran yang dapat digunakan untuk menata usahakan kredit yang diberikan dalam bentuk

⁴⁸Muhammad Syafi Antonio, *Bank Syariah*, ...h.97-98

simpanan giro, biasanya bank memberikan “jasa giro”. Sayang pada saat ini jasa giro dikenakan pajak atas bunga, *dividen*, dan *royalty*, sehingga menjadi salah satu faktor penyebab mengapa giro agak menurun. Menurut Thomas Suyatno (2007:34) “dalam pelaksanaannya, giro di tatausahakan oleh bank dalam bentuk rekening yang lazimnya disebut rekening koran (*current account*). Rekening ini juga digunakan untuk menatausahakan kredit yang diberikan dalam bentuk rekening koran”.⁴⁹

a. Jenis rekening

Rekening pada nasabah dibagi menjadi dua golongan, yaitu rekening atas nama suatu badan, dan rekening perorangan. Yang termasuk dalam golongan rekening atas nama suatu badan adalah rekening atas nama:

- 1) Instansi-instansi pemerintah / lembaga-lembaga negara dan organisasi masyarakat yang tidak merupakan perusahaan.
- 2) Fa, CV, Yayasan, PT dan semua badan hukum yang diatur dalam kitab undang-undang hukum dagang atau peraturan perundang-undangan lainnya, sedangkan yang termasuk golongan rekening perorangan adalah rekening atas nama pribadi. Dalam golongan rekening ini termasuk pula rekening yang tidak termasuk dalam golongan butir diatas tetapi menggunakan nama dagang seperti kongsi, toko, restoran, bengkel, warung dan sebagainya.

⁴⁹Thomas Suyatno, dkk, *Dasar-Dasar Perkreditan (Edisi Keempat)*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2007). h. 64-66.

b. Pengertian tentang giro

Ada tiga hal yang dapat diperhatikan dari pengertian tentang giro seperti yang telah diuraikan diatas, yaitu :

1) Simpanan pihak ketiga

Simpanan pihak ketiga merupakan penyimpanan sejumlah uang di bank dalam bentuk giro (*current account*). Simpan ini dilakukan dengan kesepakatan atau perjanjian antara pihak nasabah dan bank. Dengan demikian bank dapat dan nasabahnya terikat pada bunyi perjanjian mereka. Nasabah mempercayakan uangnya kepada bank dan bank akan mengelola uang itu menurut ketentuan yang berlaku dan telah disepakati bersama.

2) Penarikan dapat dilakukan setiap saat

Artinya bila ada nasabah yang menyetorkan pagi hari, seharusnya iapun dapat menarik dana (simpanannya) pada sore hari atau pada beberapa jam saja. Dalam hal lain, selang beberapa saat atau suatu perjanjian rekening giro dapat saja dibatalkan oleh bank maupun oleh girant. Penarikan simpanan dalam bentuk giro ini dapat dilakukan oleh penyimpan, pemilik girant tersebut setiap saat selama kantor kas bank buka.

3) Cara penarikan

Yang paling banyak digunakan adalah penarikan dengan cek/bilyet giro. Namun dengan batas-batas tertentu penarikan dalam

bentuk lain seperti dengan surat perintah lainnya, pemindahbukuan juga dapat dilaksanakan.

c. Kegunaan rekening giro

- 1) Dapat membayar transaksi jual beli dengan mempergunakan cek/bilyet giro,
- 2) Dapat mengirim transfer (kirim uang/delegasi kredit dengan jaminan rekening giro,
- 3) Keamanan/ rahasia terjamin.
- 4) Tidak perlu membawa uang dalam jumlah besar,
- 5) Dapat diambil sewaktu-waktu.

d. Jasa simpanan giro pada bank

Untuk setiap simpanan giro diberikan jasa giro yang menarik berdasarkan perhitungan saldo terendah setiap bulan dengan tarif yang besarnya ditetapkan oleh bank. Jasa giro (bunga) dari giro milik penduduk Indonesia baik dalam rupiah maupun valuta asing dibebaskan dari pengenaan Pajak atas Bunga, Dividen dan Royalty (PBDR). Adapun jasa giro dari milik bukan penduduk Indonesia, baik dalam rupiah maupun valuta asing dikenakan PBDR sebesar 10%/pemotongan dan penyetoran PBDR ini oleh bank yang bersangkutan dilakukan secara kolektif, tidak perlu diperinci menurut penerima jasa giro.

e. Giro Valuta Asing.

Pada hakikatnya sama dengan giro rupiah yang diuraikan di atas.

Perbedaanya, ialah :

- 1) Sesuai ketentuan bank Indonesia terhadap giro valuta asing tidak diberikan buku cek, penarikan (penggunaan/pengambilannya) dilakukan dengan menyerahkan amanat tertulis yang ditandatangani oleh pemegang giro. Amanat tersebut dapat berbentuk surat yang dibuat oleh pemegang giro atau berbentuk formulir yang disediakan oleh bank,
- 2) Jenis valuta asing giro adalah valuta asing yang dapat diperjual belikan pada bursa valuta asing Jakarta,
- 3) Bank yang dapat menyelenggarakan giro valuta asing adalah bank devisa,
- 4) Untuk setiap simpanan giro valuta asing diberikan jasa giro valuta asing yang menarik setiap bulan sesuai perkembangan tingkat bunga yang berlaku dipasar internasional, dan diperhitungkan berdasarkan saldo kredit tertentu,
- 5) Dapat diminta dalam bentuk uang tunai asing sepanjang persediaan bank memungkinkan.

Kegunaan rekening Giro adalah dapat membayar transaksi jual/beli dengan mempergunakan cek/bilyet giro, dapat mengirim transfer, keamanan/rahasia terjamin, tidak perlu membawa uang

dalam jumlah besar, dan dapat diambil sewaktu-waktu. Giro juga ada dalam bentuk valuta asing.

B. Tinjauan Pustaka

Berkaitan dengan judul skripsi ini yaitu tentang Praktik *Mudharabah* pada Tabungan Giro ditinjau dalam hukum Islam, Sebenarnya sudah banyak diteliti oleh peneliti yang lain selain itu dalam penelitian ini dibutuhkan beberapa referensi yang diantaranya tinjauan pustaka sebagai bentuk pengkayaan dan penguat untuk penelitian ini...

1. Skripsi Fitriyatuz Zahroh yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Simpanan Mudharabah Berjangka*". (2016). Jurusan Syariah, Prodi Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*). Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga, skripsi ini mendeskripsikan tentang bagaimana pelaksanaan bagi hasil simpanan *Mudharabah* berjangka di BMT Tumang Cabang Salatiga.⁵⁰
2. Skripsi Andi Irawan yang berjudul "*Penghimpunan Dana Dengan Akad Mudharabah Pada Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Pembantu Lampung Timur*". (2018). Jurusan Hukum, Prodi Hukum Keperdataan. Universitas Lampung Bandar Lampung, skripsi ini mendeskripsikan tentang bagaimana pelaksanaan penghimpunan dana

⁵⁰Fitriyatuz Zahroh "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Simpanan Mudharabah Berjangka*" (IAIN Salatiga, Diakses pada tanggal 08 Agustus 2020).

dengan akad *mudharabah* pada Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Pembantu Lampung Timur.⁵¹

3. Skripsi Fadillah Ahmad yang berjudul analisis Penerapan Akad Mudharabah Mutlaqah Pada Tabungan Mabrur Untuk Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Studi Pada Bank Syariah Mandiri KCP Belitang. Membahas tentang bagaimana penerapan akad *mudharabah mutlaqah*, pada tabungan *mabrur* untuk biaya perjalanan ibadah haji pada bank syariah Mandiri KCP Belitang. Dari skripsi ini dapat disimpulkan bahwa penerapan tabungan *mabrur* di Bank Syariah Mandiri KCP Belitang menggunakan akad *Mudharabah* sesuai dengan Fatwa DSM-MUI menetapkan fatwa No: 02/DSN/MUI/IV/2000 menyatakan bahwa tabungan yang tidak dibenarkan secara Syariah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga.⁵²

Dari beberapa karya ilmiah yang ada, setelah penulis mengamati dan menelusurinya, kajian secara spesifik dan komprehensif terdapat persamaan ataupun perbedaannya, adapun persamaannya yaitu terletak di objeknya yaitu bank, sedangkan perbedaannya membahas masalah tentang mudharabah dalam tabungan giro yang akan dibahas oleh penulis. Berdasarkan hasil pustaka di atas, penyusun ketahui bahwa belum ada penelitian yang spesifik membahas tentang akad Mudharabah pada tabungan giro.

⁵¹Andri Irawan. “Penghimpunan Dana Dengan Akad Mudharabah Pada Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Pembantu Lampung Timur”, (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung 2018).

⁵²Fadillah Ahmad.”Analisis Penerapan Akad Mudharabah Mutlaqah Pada Tabungan Mabrur Untuk Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Studi Pada Bank Syariah Mandiri KCP Belitang)”, (Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2018).

Oleh karena itu, mengenai Praktik Mudharabah Pada Tabungan Giro Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN). merupakan hal yang baru dan bukan pengulangan dari penelitian sebelumnya sehingga penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut dengan sebuah karya ilmiah.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur`an dan Hadits

- Al-Quran Tajwid dan Terjemahan* Jakarta, Maghfirah Pustaka, 2006.
Hadist riwayat Imam Tirmidzi, *Sunan Tirmidzi*, Kitab Ahkam, bab: “*ma dzukira ‘an Rasulillah*”, No: 1272.
Jalaluddin Al-Suyuthi, *Al-Jami’ Al-Shaghir min Ahadist Al-Basyir Al-Nadzir*, Oman: Dar Al-hadits, 2016.

B. Buku

- Abdul Aziz Dahlan, et.al., *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jilid 4, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
Abdul Wahab Khalaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.
Abu Azam Al-Hadi, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Cet 1-surabaya: UIN SA Press, 2014.
Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
Ahmad Ilham Solihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010.
Ahmad Wardi Muslic, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
Antonio Muhammad Syafii, *Bank Syariah; Wawancara Ulama dan Cendekiawan*, Jakarta: Tazkia Intitute, 1999.
Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.
Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana, 2006.
Dahlan Abdul Aziz, et.al., *Ensiklopedia Hukum islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Houve, 1996.
Gita Danuprata, *Buku Ajar Manajemen Perbankan Syariah*, Jakarta: Salemba Empat, 2013.
Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Cet Ke-7 Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
Heru Wahyudi, *Fiqh Ekonomi*, Bandar Lampung: Lembaga Penelitian Universitas Lampung, 2012.
Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontenporer*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016.
Jeni Susyanti, *Operasional Keuangan Syariah*, Malang: BPFE UNISMA, 2016.
Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
_____, *Dasar-dasar Perbankan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
Kholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Akasara, 2007.
Lexy J. Moleong, *Metode penelitian Kualitatif*, Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2011.

- Makhalul Ilmu, *Teori dan Praktek Mikro Keuangan Syariah*, Yogyakarta: UII, 2002.
- Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- _____, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005.
- _____, *Model-model Akad Pembiayaan di Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2009.
- Muhamad Safii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2005.
- _____, Syafii Antonio, *Bank Syariah; Wacana Ulama dan Cendikiawan*, Jakarta: Tazkia Intitute, 1999.
- Muhammad Yazid, *Hukum Ekonomi Islam (Fiqh Muamalah)*, Cet 1-surabaya: UIN SA Press, 2014.
- Nafan, *pembiayaan musyarakah dan mudharabah*, Yogyakarta: graha ilmu, 2014.
- Neneng Nurhasanah, *Mudharabah Dalam Teori Dan Praktik*, Bandung: Refika Aditama, 2015.
- Rachmat syafei, *Fiqh Muamalah untuk IAIN, STAIN, PTAIS, dan Umum*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- _____, Syafei, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jakarta: Pundi Aksara, 2006.
- Sjahdeini Sutan Remi, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: PT. Temprint, 1999.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Thomas Suyatno, dkk, *Dasar-Dasar Perkreditan (Edisi Keempat)*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2007.
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wadillatuhu*, Jilid 5 Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Wiroso, *Penghimpunan Dana Dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*. Jakarta: PT Grasino, 2005.
- Zainudin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

C. Sumber Fatwa DSN

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 *Tentang Pembiayaan Mudharabah*.

D. Jurnal

- Andri Irawan. "Penghimpunan Dana Dengan Akad Mudharabah Pada Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Pembantu Lampung Timur", Skripsi Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung 2018.
- Fadillah Ahmad. "Analisis Penerapan Akad Mudharabah Mutlaqah Pada Tabungan Maburur Untuk Biaya Perjalanan Ibadah Haji" (Studi Pada Bank Syariah Mandiri KCP Belitang)", Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2018.

Firdaweri, “*Perikatan Syariah Berbasis Mudharabah (Teori dan Peraktik)*” Jurnal Asas, Vol.6, No .2,(Juli 2014), h.59.

Fitriyatuz Zahrer “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Simpanan Mudharabah Berjangka*” IAIN Salatiga, Diakses pada tanggal 08 Agustus 2020.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama,2011.

E. Wawancara

Wawancara, Nindya Qurrata Aini, *Sub Branch Manager*, Bank Muamalat KCP Antasari, 10-11-2020.

Wawancara, Eky Aresha, *Nasabah*, Bank Muamalat KCP Antasari, 11-11-2020.

Wawancara, Bercah Pitaewas, *Nasabah*, Bank Muamalat KCP Antasari, 11-11-2020.

F. Sumber On-line

<https://id.scribd.com/doc/112156532/Makalah-Tentang-Giro>
www.bi.go.id

